

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi golongan III pegawai negeri sipil berdasarkan KMNA/ KBPN No.2 Tahun 1998 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, sebagian besar 58,2% (32 responden) belum dapat diberikan Hak Milik, dikarenakan adanya salah satu syarat belum dapat dipenuhi yaitu belum melakukan pelunasan harga rumah dan tanah. Namun 41,8 % (23 responden) sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KMNA/ KBPN No. 2 Tahun 1998 yaitu sudah memperoleh Surat Izin Penghunian (SIP), mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 Tahun, belum pernah memperoleh/ membeli rumah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, mempunyai sertipikat Hak Pakai serta melunasi harga rumah dan tanah. Oleh karena itu calon pemegang hak milik atas tanah telah mengajukan permohonan pendaftaran hak milik dan telah memperoleh sertipikat hak milik atas tanah.
2. Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi golongan III Pegawai Negeri Sipil di Kota Sorong Provinsi Papua Barat sebagian

besar belum dapat diberikan hak milik yang disebabkan salah satu syarat belum dipenuhi maka pemberian hak milik belum mewujudkan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pejabat Kantor Pertanahan Kota Sorong Papua Barat dapat mempertahankan kinerja kerja yang telah baik dalam pelaksanaannya dan pelayanan, dalam memberikan informasi-informasi terkait pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi golongan III pegawai negeri sipil dalam memberikan kepastian hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1998 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
2. Pegawai Negeri Sipil khususnya golongan III sebaiknya segera melakukan pelunasan pembayaran dan mengajukan pendaftaran permohonan hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2006, *Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, BP.Cipta jaya-Jakarta
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional*, Jilid I, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta
- Diana Leo Lita, 2008 “*Perolehan Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Dari Perubahan Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Negara Golongan III di Perumahan IKIP UNY, Kelurahan CaturTunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Berdasarkan KMNA/Kepala BPN No.2 Tahun 1998*, Penulisan Hukum , Yogyakarta.
- Effendi Perangin, 1998, *Hukum Agraria Di Indonesia*. PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- A.P.Parlindungan, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative)*, cetakan VII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1997, *Tafsiran Undang-Undang Pokok-pokok agrarian(1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996)*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria&hak-hak Atas Tanah*, Cetakan ke -1, PT Fajar Interpretama Offset,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (UUPA)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang *Perumahan dan Permukiman*

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawain*

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 *Tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara*

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1998 (KMNA/ KBPN No.2 tahun 1998) *Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.*



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

Jln. Jenderal Sudirman Telp. (0951) 323675 / Fax. (0951) 325023

Sorong, 02 Mei 2011

Nomor : /92.71/V/2011
Lampiran : -
Perihal : **IJIN RISET**

Kepada

Yth. WAKIL DEKAN I
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
di-
Jogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 254/V, tanggal 19 April 2011
perihal tersebut diatas, atas nama :

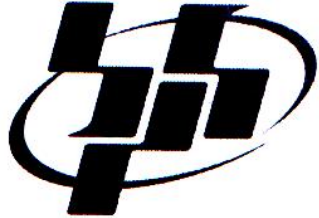
Nama : Maria Situmorang
Nomor Mahasiswa : 09540
Judul Skripsi : Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah
Negara Golongan III Bagi Pegawai Negeri Sipil
dalam memberikan Kepastian Hukum berdasarkan
Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1998 di Kota
Sorong Papua Barat.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan riset pada Kantor
Pertanahan Kota Sorong.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SORONG


Drs. HOTMAN SITUMORANG, SH
Nip. 19560718 197803 1 001



Badan Pusat Statistik Kota Sorong

SURAT KETERANGAN

Nomor: 91716.004

Kepada Yth

Pimpinan Universitas Atma Jaya

Di

Yogyakarta

Sehubungan dengan tugas pengumpulan data untuk keperluan skripsi, maka kami menerangkan bahwa nama di bawah ini benar telah meminta data dan mengumpulkan data dari kantor BPS Kota Sorong.

NAMA : MARIA SITUMORANG
NIM : 06 05 09540
JURUSAN : HUKUM PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
FAKULTAS : ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sorong, 02 Mei 2011

An. **KEPALA BPS KOTA SORONG**
Kasir IPDS



BONA VENTURA HARDI, SST
NIP. 19780512 199912 1 001

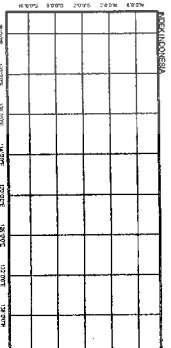


BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
KAWIL BPN PROVINSI PAPUA BARAT

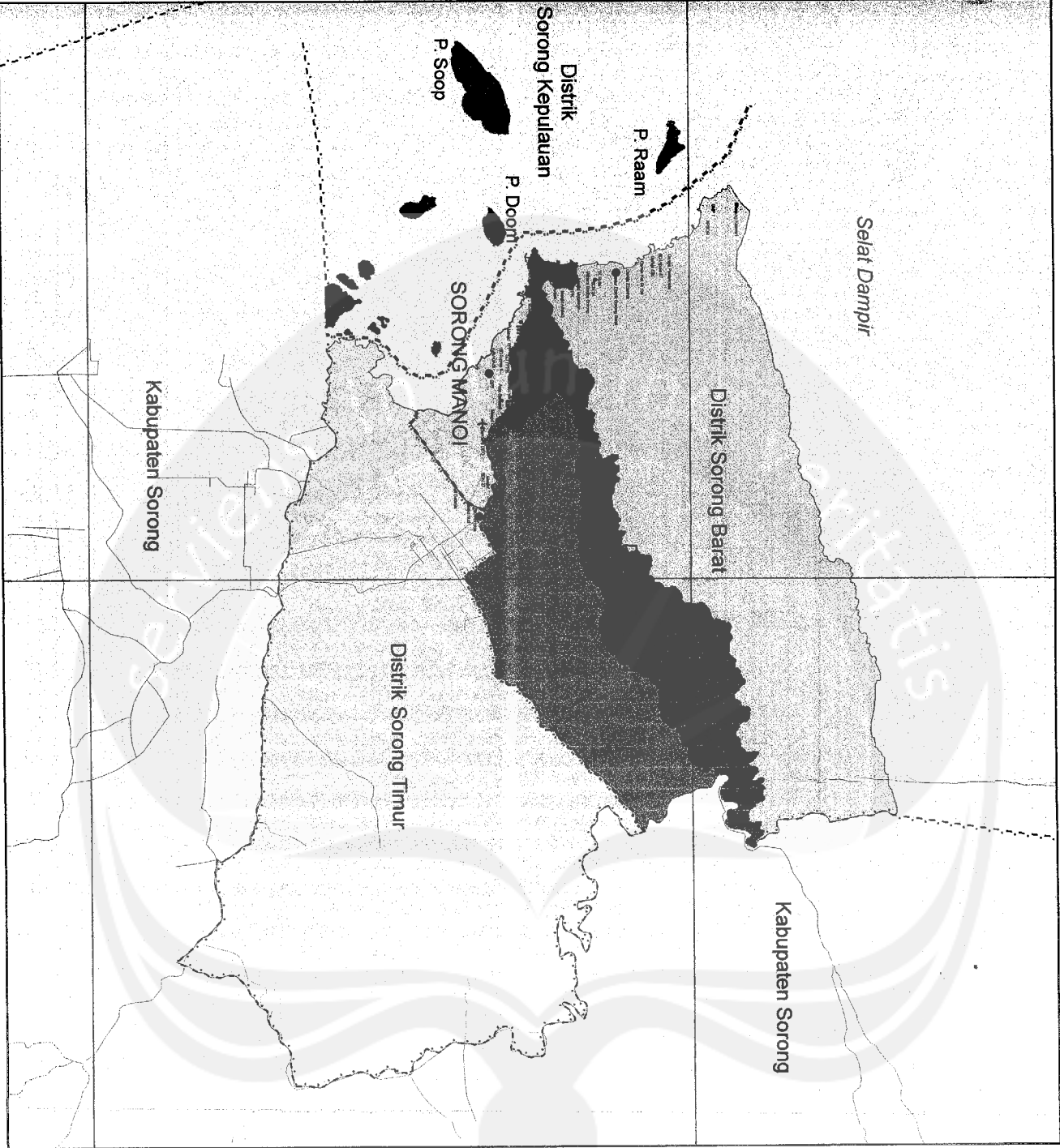
**ADMINISTRASI
KOTA SORONG**



SKALA 1 : 128.000



- Keterangan**
- Ibu kota Kabupaten/kota
 - Ibu kota Distrik
 - Ibu kota Kelurahan
 - ⊕ RSUD
 - ⊞ Kantor Pos
 - M KODIM
 - ⊞ Polres
 - ⊞ Palabuhan
 - ⊞ Bandara
 - ⊞ Batas kabupaten/kota
 - ⊞ Batas kecamatan/distrik
- Jalan
 - Sungai
 - SORONG
 - SORONG BARAT
 - SORONG KEPULAUAN
 - SORONG MAMOI
 - SORONG TIMUR
 - SORONG UTARA



Sumber :
1. Peta Administrasi Kabupaten Sorong 2010
2. Peta Administrasi Kecamatan Sorong
3. Peta Pengamanan Tanah Kota Sorong

Nasca Pengamanan Tanah Tahun 2010



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG**

K W I T A N S I

No. 1362 / 12 / 09

Terima dari

ARRANG HARIH H

Alamat

KESAU UTARA

No.	UNTUK PEMBAYARAN	BIDANG	LUAS	NO. BUKTI/ NO. DI.305	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah				
2	Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali				
3	Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah				
4	Informasi Pertanahan				
	a.				
	b.				
	c.				
5	Pemeriksaan Tanah <i>konstatering</i>	1	257 m ²	$\frac{3293}{10} 00$	82.250
6	Konsolidasi Tanah				
7	Retribusi Tanah				
8	Penetapan Hak Atas Tanah				
	Nomor :				
	Tanggal :				
9	Transportasi				
10	Biaya SPK				
11	Lain - lain				
	JUMLAH				82.250
	TERBILANG				

DI.301 :	/
Tgl. :	
DI.302 :	/
Tgl. :	
DI.303 :	/
Tgl. :	

Sorong, 04 - 12 - 2009

Bendahara Penerimaan

ANTHA DRAWATI
 NIP. 650.007.796



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN NASIONAL

KETERANGAN
No. 103 / 02 / 10

Terima dari

ANANG HARIS. H

Alamat

REPU UTARA

No.	UNTUK PEMBAYARAN	BIDANG	LIAS	NO. BUKU NO. DESK	BIAYA	
1	2	3	4	5	6	
1	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah					
2	Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali	1	257 D ²	355 10	25.000	
3	Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	1		01	25.000	
4	Informasi Pertanahan				25.000	
	a. Kuisipan					
	b.					
	c.					
5	Pemeriksaan Tanah					
6	Konsolidasi Tanah					
7	Retribusi Tanah					
8	Penetapan Hak Atas Tanah					
	Nomor : 15 / Hk. 1000 - 92.71 / 10					
	Tanggal : 02 - 02 - 2007					
9	Transportasi					
10	Biaya SPK					
11	Lain-lain					
	JUMLAH					75.000
	TERBILANG					

DI.301 :	/
Tgl. :	
DI.302 :	/
Tgl. :	
DI.303 :	/
Tgl. :	

Sorong, 01 - 02 - 2007



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG

Jl. Jenderal Sudirman No. 24 Telp. (0951) 325023 Sorong

Sorong, 02 - 02 - 2010

Nomor : 103 / 02 . 71 / II f-12
Perihal : Perintah Setor

Kepada
Yth. Sdr. ANANG HARIS . H
di -

SORONG

Sehubungan dengan permohonan SK yang saudara ajukan atas tanah yang terletak di :

Kelurahan : PERU UTARA
Distrik : SORONG

Dengan ini diberitahukan untuk Pemberian Hak Milik dimaksud berdasarkan PP No. 46 Tahun 2002 kepada Saudara diwajibkan membayar sebesar Rp. 75 . 000 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| a. Biaya Pengukuran Pemetaan bidang tanah | Rp. |
| b. Biaya Pemeriksaan Panitia A/Konstantasi | Rp. |
| c. Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali | Rp. 25 . 000 |
| d. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah | Rp. 25 . 000 |
| e. Informasi Pertanahan | Rp. 25 . 000 |
| f. Uang Pemasukan SK. No . 15 / MS / 601 . 92 . 71 | Rp. |
| Tanggal 02 - 02 - 10 | Rp. |
| | Rp. |
| | Rp. |

Uang tersebut harus disetor melalui Bendahara Penerima pada Kantor Pertanahan Kota Sorong.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kantor Pertanahan
Kota Sorong

Drs. HOTMAN SITUMORANG, SH

NIP. 19560718 197803 1 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG

Nomor : 15 / HM / BPN - 98 / 71 / 2000

TENTANG

KONFIRMASI PEMBERIAN HAK MILIK
ATAS TANAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PEMERINTAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Sorong atas tanah yang terletak di :

Jalan : Nuri
Kelurahan : Remu Utara
Distrik : Sorong
K o t a : Sorong

Telah dibeli Pemerintah oleh :

Nama : ANANG HARRIS HARTIANTO
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat Tinggal : Jln. Nuri NO.15 Kelurahan Remu Utara

b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah Negara kepada Pegawai Negeri Sipil;

~~c. Bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran tanah tersebut perlu mengeluarkan Konfirmasi mengenai Pemberian Hak Milik sebagaimana dimaksud pada huruf b;~~

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002;
 6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2001;
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
 8. Keputusan Menteri Negara Agraris/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengkonfirmasi Pemberian Hak Milik atas tanah terletak di:
Jalan : Nuri
Kelurahan : Remu Utara
Distrik : Sorong
Kota : Sorong
Seluas : 257 M² (Dua ratus lima puluh tujuh meterpersegi)

Sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur tanggal 29 Januari 1998 Nomor : 270/1998 atas nama :

N a m a : ANANG HARRIS HARTIANTO
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 22-02-1978
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tinggal : Jln. Nuri No.15 Kelurahan Remu Utara

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk menarik dokumen-dokumen sehubungan dengan permohonan Hak Atas Tanah tersebut.

KETIGA : Memberikan kepada ANANG HARRIS HERTIANTO berkedudukan di Jalan Nuri No.15 Kelurahan Remu Utara Hak MILIK semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Sorong atas sebidang tanah seluas 257 M2 (Dua ratus lima puluh tujuh meterpersegi) sebagaimana dluraikan dalam Surat Ukur tanggal 29-01-1998 Nomor : 270/1998 terletak di Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena Pemberian Hak ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya.
3. Tanah tersebut harus dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan.
4. Penerima hak diwajibkan membayar uang pendaftaran pertama kali dan biaya pemeliharaan data sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Sorong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada waktu ditetapkan.

Ditetapkan di : SORONG

Pada Tanggal : 02 - 02 - 2010



Kepada Saudara : ANANG HARRIS HARTIANTO

Berindak U/A.n. Diri Sendiri

Dengan Alamat : Jalan Nuri no.15 Kelurahan Remu Utara.

TEMBUSAN Keputusan Ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
2. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI di Jakarta;
3. Deputi Bidang Informasi Pertanahn BPN RI di Jakarta;
4. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan BPN RI di Jakarta;
5. Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN RI di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Sorong di Sorong.

KEPADA Yth.

PERMOHONAN HM (Secara Umum)
Atas Untuk Rumah Tinggal yang telah
Dibeli oleh Pegawai Negeri dari
Pemerintah

Bpk. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Sorong
di -
SORONG

Yang bertanda tangan di bawah ini ANG HARRIS HARTIANTO alamat Jl. Nuri 15 Kel. Remu Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ~~diri sendiri~~ dengan ini mengajukan permohonan Hak Milik (Secara Umum) atas tanah untuk rumah tinggal yang telah saya beli dari Pemerintah dengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI DIRI PEMOHON :

1. Nama dan Umur : Ang Harris Hartianto, 31 Thn.
2. Bukti Identitas dan SK - PNS, SK Pensiun, Keterangan Waris dll : KTP Srt Fenny Ahli Waris terlahir
3. Pekerjaan / Jabatan : Tidak Ada
4. Tempat tinggal / kedudukan : Jln. Nuri No: 15 Kel. Remu Utara.
5. Susunan keluarga isteri : -
6. Anak yang masih menjadi tanggungan :
a. -
b. -
c. -

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Statusnya : Hak Pakai No. 200 /
Bekas /
Tanah Negara dll
2. Surat Ukur / Gambar Situasi : Tgl. 29-01-98 Nomor 270/1998.
3. Luas : 257 M2
4. Letaknya : Jalan : Nuri
Kelurahan : Remu Utara
Distrik : Sorong
Kota : Sorong
Provinsi : Papua Barat
5. Batas-batas : Utara P. 278
Timur P. 273
Selatan P. 283
Barat Jalan Nuri.
6. Penggunaan : Rumah Tinggal
7. Pengusaannya : Sepenuhnya dikuasai pemohon.
(Sepenuhnya dikuasai pemohon, atau ditempati oleh pihak lain atas persetujuan pemohon)

C. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI SIPEMO HON

(Sebutkan Status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten/Kotamadyanya saja)

- : 1.
2.
3.
4.dst

D. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Foto copy Bukti Identitas / Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia : Fc.Ktp Terlampir,.....
2. Sertipikat Tanah yang dimohon : Sertifikat terlampir,.....
3. Bukti Rumah Tinggal (IMB, Keterangan Kepala Desa / Lurah, dll) : -.....
4. Foto copy SPPT-Pajak Bumi dan Bangunan : Terlampir,.....
5. Surat Pernyataan mengenai jumlah bidang tanah, luas dan status haknya yang dipunyai pemohon : Terlampir,.....

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Catatan : Coret yang tidak perlu

Sorong, Tgl. 09 - 12 - 2009 :

Pemohon,


(ANANG HARRIS PARTIANTORO)



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG

Jln. Jenderal Sudirman Telp / Fax. (0951) 325023
SORONG

Risalah Pemeriksaan Tanah

(Konstatering Rapport)

No: 02.3 /KR/ I (2010).

Pada hari ini S e l a s a Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari 2010 (dua puluh enam), yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong atau Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstataasi) sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Tanggal 27-01-2010 No: 30/ST.92.71-300.5/I/2010, telah meneliti data administratif dan Data Fisik serta datang kelokasi tanah yang dimohon mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik dari ANANG HARRIS HARTIANTO.

I. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN

1. Jenis Hak : Hak Milik.
2. Jangka Waktu : -
3. Subyek Hak : ANANG HARRIS HARTIANTO.
4. Luas : 257 M²
5. Surat Ukur/Peta Bidang Tanah : No. 270/1998 Tgl. 29-01-1998.
6. Letak Tanah :
 - a. Jalan : Nuri
 - b. Kelurahan : Pemu Utara.
 - c. Distrik : Sorong.
 - d. Kota : Sorong.
 - e. Provinsi : Papua Barat
7. Penggunaan
 - a. Penggunaan saat ini : Rumah tinggal.
 - b. Rencana Penggunaan : -

II. DATA PENDUKUNG

1. Fotocopy KTP;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan;
4. Sertipikat Asli;
5. SPPT PBB Tahun 2009;
6. SK. Bupati Sorong;
7. Surat Tanda Setor;
8. Srt Penunjukan Rumah Negara;
9. -

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Republik Indonesia dan Kantor Pertanahan.
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

IV. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBYEK HAK

PERORANGAN :

N a m a : ANANG HARRIS HARTIA TO.
Tempat Tgl. Lahir (Umur) : Serong, 22-02-1979.
Pekerjaan : Tidak ada.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jalan Nuri No:15 Kel.Remu Utara.
Bertindak Untuk dan atas Nama : diri sendiri.

BADAN HUKUM : -
Beralamat di : -
Akta Pendirian : -
Tgl. No. : -

V. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBYEK HAK

1. Alas Hak :

a. Riwayat Tanah :

- Bahwa Tanah tsb statusnya adalah Tanah Negara dan telah bersertifikat Hak Pakai No:280 Tgl:11-03-1999 seluas : 257 M² atas nama : Pemerintah Daerah Tingkat II Sorong.

b. Riwayat Perolehan Tanah :

- Bahwa tanah tsb diperoleh pemohon berdasarkan Keput. Bupati Sorong No:122/2009 tgl:13-03-2009 An.HARTONO (Alm) akta kematian terlampir, Surat Keterangan Ahli Waris, serta Surat Pernyataan Ahli Waris Tgl: 30-11-2009.

c. Riwayat Hak Atas Tanah :

- Bahwa tanah tsb telah bersertifikat Hak Pakai No:280 Tgl:11-03-1999 seluas :257 M² An.Pemda Tk.II Sorong berdasarkan SK.Pakanwil BPP Propinsi Irian Jaya Nomor : BPP.66/TP/1999 tgl:22-10-1999.

d. Pemanfaatan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah :

- Bahwa tanah tsb pada saat kunjungan lapang, telah dimanfaatkan dgn baik dan ditunjang untuk rumah tinggal serta masih dikuasai sepenuhnya oleh pemohon.

2. Data Fisik :

Berdasarkan Surat Ukur ~~XXXXXXXXXX~~ Nomor :270/1998..... tanggal 20-01-1998 seluas257..... M² (.....Dua Ratus Lima Puluh Tujuh..... meterpersegi) yang terletak di Jalan N u r i KelurahanRenukitara.....; Distrik Sorong.....; Kota Sorong. Tanda batas tanah dalam keadaan baik dan utuh.

3. ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN

- Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena Pemberian Hak ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
- Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya.
- Tanah tersebut harus dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan. Yang saat ini dipergunakan untuk Rumah Tinggal.
- Penerima hak diwajibkan membayar Uang pemasukan kepada Negara melalui Bendaharawan Khusus Penerima Kantor Pertanahan Kota Sorong sebesar Rp..... (..... rupiah), sesuai Perataturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.
- Penerima hak diwajibkan pula membayar uang pendaftaran pertama kali, Kutipan Surat Ukur dan pemeliharaan data sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai Perataturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian tersebut permohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan alasan :
2. Telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif.
3. Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007.
4. Bahwa pada saat pemeriksaan kelokasi tidak terdapat keberatan dri pihak lain
5. Bahwa tanah yang dimohon seluas M² (Dua Ratus Lima Puluh Tujuan meterpersegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 1998 tanggal 1998.
6. Bahwa NJOP Tahun .. 2009 adalah sebesar Rp. 160.000,- /M² dan NPPTKUP Kota Sorong sebesar Rp. 20.000.000,-.

Jemkian hasil pemeriksaan ini dibuat pada hari ini tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Pemeriksa,

JANTJE MAERLING
NIP. 195705161983011002.

Mengetahui :
KEPALA KANTOR PEKERTAHAN
NORNA SORONG

Drs. HOTMAN SITUMORANG, S.H.
NIP. 19560710197031001.-

SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI PEMOHON

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANANG HARRIS HARTIANTO.
Umur : 31 Thn.
Pekerjaan : Tidak ada.
Alamat : Jalan Nuri No.15 Kel.Remu Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal Nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemohon :

Nama :
(Perorangan atau Badan Hukum)
Pekerjaan :
(bila perorangan)
Alamat/berkedudukan di :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saya Isteri/Suami dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan saya telah mempunyai tanah-tanah (termasuk tanah yang dimohon) sebanyak 1 - Satu () bidang dan luas keseluruhannya adalah 257 M2 ()
- Bahwa PT (Badan Hukum)telah mempunyai tanah-tanah (termasuk) tanah yang dimohon) sebanyak () bidang dan luas keseluruhannya adalah M2 ()


yang perinciannya terdiri dari

Nomor Urut	Status Hak (Jelaskan Nomor Hak/ belum sertipikat)	Luas (M2)	Letak Tanah (Kab/Kodya dan Prop)
1	P. 280.	257	- Jln. Nuri
2	dst		- Kel.Remu Utara.
Jumlah			

Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan ijin mengalihkan hak atas tanah hak.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sanggup dituntut dihadapan Pengadilan bila ternyata di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Jorong tanggal 09 - 12 - 2009
Pemohon

(ANANG HARRIS HARTIANTO)
Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ATTANG HARRIS HARTIANGO.**

Alamat : **Jalan Nuri No.15 Kelurahan Remu Utara,**

Pekerjaan : **Tidak ada.**

Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan **TURI**

Kelurahan **Remu Utara**, Distrik **Sorong** Kota Sorong

Provinsi Papua Barat, seluas **257** M2 yang telah diberikan Hak **Milik**

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong sampai saat ini secara fisik masih kami kuasai dan hingga saat ini tidak ada sengketa / permasalahan dengan pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
seperlunya.

Yang Membuat Pernyataan,



(**ATTANG HARRIS HARTIANGO**)



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG

Jl. Jenderal Sudirman Telp. (0951) 325023 Sorong

SURAT TUGAS

Nomor : 30/ST.92.71-300.5/T/2010.

pala Kantor Pertanahan Kota Sorong dengan ini memerintahkan kepada :

nama : JANTJE MARRERING, BA.
P : 195906181983011002.
abatan : Kasubsi Penetapan Hak Tanah.
angkat/Gol. : Penata Muda Tk.I / IIT.b

tuk melaksanakan Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis tentang Permohonan ^{Konfirmasi} ~~Peningkatan~~ Hak Milik atas bidang tanah yang terletak di :

lan : Turi.
urahan : Bumi Utara.
istrik : Sorong.
ota : Sorong
luas : 257 M²
s. Hak : H.299.
as Permintaan : ANANG HARRIS HARTIANTO.

gas-tugas tersebut agar diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, terhitung sejak Surat Tugas ini dikeluarkan.

emikian untuk dilaksanakan.

Sorong, 27 - 01 - 2010.-

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SORONG

DOTS MOTMAN SITUMORANG, SH. =
NIP. 195607181978031001.



SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 128 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENJUALAN RUMAH DINAS GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAHNYA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa rumah yang dimohon untuk dibeli oleh Pegawai Negeri Sipil adalah Rumah Dinas Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Sorong yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status tanahnya adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sorong.
- b. bahwa pegawai calon pembeli telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun keatas dan tidak dalam masalah hukum dan kepegawaian.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sorong.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4548);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Status Rumah Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksana Penjualan Rumah Daerah Golongan III;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sorong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menjual Rumah Dinas Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sorong kepada PNS dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Harga penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta ganti rugi atas tanah, sebesar Rp. 15.000.000 telah dibayar lunaskan oleh Sdr. Harsoyo melalui Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong.
- KETIGA** : Sertifikat Hak atas Tanah serta Bangunan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA akan diserahkan kepada Pihak Pembeli dan selanjutnya dapat dilakukan balik nama pada Kantor Pertanahan Kota Sorong sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 18 – 03 - 2009

BUPATI SORONG,
CAP/TTD
Dr. STEPANUS MALAK, Drs. M.SI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 128 TAHUN 2009
TANGGAL 18-03- 2009

PENETAPAN PENJUALAN RUMAH DINAS GOLONGAN III KEPADA PNS
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

No.	Nama	Tanggal Permohonan	Nomor Registrasi	Luas M ²		Alamat	Keterangan
				T	B		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harsoyo	03-03 – 2009	022/RN-III/2000	227	54	Jl. Nuri No.15	P. ...

BUPATI SORONG,
CAP/TTD
Dr. STEPANUS MALAK, Drs. M.Si

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
 PEMERINTAH KABUPATEN SORONG, BAGIAN HUKUM,





PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

JL. SORONG KLAMONO KM. 24 AIMAS II

Form. A

Lampiran :
Perihal : Permohonan Membeli
Rumah Negara Gol. III

Kepada Yth :
Bapak Bupati Kabupaten Sorong
Cq. Ketua BAPPEDA Kab. Sorong
Di -

SORONG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama / NIP / NRP / NIK | : | H A R S O Y O / 110012845 |
| 2. Tempat / Tgl. Lahir | : | Blitar, 10 Juni 1946 |
| 3. Pekerjaan | : | Pensiunan PNS |
| -- Pangkat / Gol. | : | Pembina IV/a |
| - Jabatan | : | Kabag. Tata Usaha |
| 4. Instansi / Tempat Kerja | : | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sorong |
| 5. Penghasilan per bulan | : | Rp. 2.300.000,- |
| 6. Nama Almarhum Suami / Istri *) | : | |
| 7. Tempat dan Tgl. Meninggal *) | : | |
| 8. Instansi Tempat Kerja terakhir *) | : | |
| Almarhum | : | |
| 9. Masa Kerja Almarhum *) | : | 33 Tahun |
| 10. Rumah Negara yang ditempati | : | |
| A. Letak | : | |
| Jalan No. | : | Jl. Nuri No. 15 |
| Kelurahan | : | Remu Utara |
| Kecamatan | : | Sorong Kota |
| Kabupaten / Kota | : | Sorong |
| B. Huruf Daftar Nomor | : | 22/RN-III/2000 |
| C. Tipe / Kelas Rumah/Luas Tanah | : | II (DUA) / 54 / 227 M2 ✓ |
| 11. Nomor dan Tanggal SIP | : | 171/Peg.0/SIP/SRG/1999 - 2000 |

Mengajukan permohonan membeli Rumah Negara yang dewasa ini saya tempati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor : 8 Tahun 1991 dan selanjutnya saya akan patuh dan taat pada semua Peraturan dan ketentuan yang berlaku atas penjualan rumah negara Gol. III tersebut.

Demikian Permohonan ini saya sampaikan beserta lampiran untuk dicabulkan, terima kasih.

Sorong, Maret 2009

Pemohon



*) No. 6 dari 9000 orang ahli waris
Apabila pemegang SIP telah almarhum.



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
. JL. SORONG KLAMONO KM. 24 AIMAS II

Form. A1

SURAT KETERANGAN TENTANG MASA KERJA

Nomor :

Yang beranda tangan dibawah ini :
N a m a : Drs. SUDIRMAN, M.Si
N I P : 640 013 729
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ketua BAPPEDA Kab.Sorong

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama / NIP / NRP /NIK : H A R S O Y O / 110012845
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabag Tata Usaha

Permohonan Beli Rumah Negara Golongan III :
A. Letak :
Jalan No. : Jl. Nuri No. 15
Kelurahan : Remu Utara
Kecamatan : Sorong Kota
Kabupaten / Kota : Sorong
B. Huruf Daftar Nomor : 22/RN-III/2000
C. Tipe / Kelas Rumah/Luas Tanah : II (DUA) / 54 / 227 M2

Adalah benar-benar bekerja / terakhir bekerja *) pada Instansi / Dinas kami dengan masa kerja keseluruhan : 33 tahun .

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan membeli rumah negara golongan III milik Pemerintah Kabupaten Sorong yang diajukan oleh yang bersangkutan.

Sorong, Maret 2009

Ketua BAPPEDA Kab. Sorong





PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

JL. SORONG KLAMONO KM. 24 AIMAS II

Form. A2

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MEMBELI / MEMPEROLEH
RUMAH NEGARA
(Lampiran Surat Permohonan membeli Rumah Negara)

Yang betanda tangan dibawah ini :
Nama / NIP / NRP / NIK : H A R S O Y O / 110012845
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabag Tata Usaha
Permohonan Beli Rumah Negara Golongan III :
A. Letak :
Jalan No. : Jl. Nuri No. 15
Kelurahan : Remu Utara
Kecamatan : Sorong Kota
Kabupaten / Kota : Sorong
B. Huruf Daftar Nomor : 22/RN-III/2000
C. Tipe / Kelas Rumah/Luas Tanah : II (DUA) / 54 / 227 M2
D. Nomor dan Tanggal SIP : 171/Peg.0/SIP/SRG/1999 – 2000

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah dengan jalan / cara memperoleh / membeli rumah dari negara. Surat Pernyataan ni untuk melengkapi permohonan membeli rumah negara golongan III milik Pemerintah Kabupaten Sorong dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka permohonan pembelian saya dapat dibatalkan secara sepihak dan saya bersedia memikul kerugian-kerugian dan sanksi yang ditimbulkan karenanya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Sorong, Maret 2009

Pemohon





PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

JL. SORONG KLAMONO KM. 24 AIMAS II

SURAT PENUNJUKAN RUMAH NEGARA

Nomor :

Berdasar Peraturan Perumahan Sipil Tahun 1934, LN. Tahun 1934 No. 147 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor : 204 Tahun 1995.

Diberikan kepada

Nama / NIP / NRP / NIK : HARSOYO / 110012845
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabag Tata Usaha
Instans / Tempat Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sorong
Penghasilan per bulan : Rp. 2.300.000,-
Jumlah Keluarga : 4 (empat) orang / terdiri dari :

No.	Nama Anggota Keluarga	L/P *)	Tempat / Tgl. Lahir	Keterangan
1.	TURASMI	P	Medan , 15 Juli 1958	Istri
2.	ANANG HARRIS HARTIANTO	L	Sorong, 22 Pebruari 1978	Anak
3.	EMMY HARTI HARYUNI	P	Sorong, 08 Desember 1980	Anak

*) Laki - laki / Perempuan

Untuk mendiami Rumah Negara :

A. Letak

Jalan No. : Jl. Nuri No. 15
Kelurahan : Remu Utara
Kecamatan : Sorong Kota
Kabupaten / Kota : Sorong

B. Huruf Daftar Nomor : 22/RN-III/2000

C. Tipe / Kelas Rumah/Luas Tanah : II (DUA) / 54 / 227 M2

D. Nomor dan Tanggal SIP : 171/Peg.0/SIP/SRG/1999 - 2000

E. Keterangan lain : ---

Surat Penunjukan ini berlaku surut terhitung mulai :

Jika dikemudian hari ternyata ada kekelruan, maka pernyataan ini dapat dicabut dan diubah sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : SORONG

Pada Tanggal

KETUA BAPPEDA KABUPATEN SORONG



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN



Sorong, 18 November 2001

Nomor : 012/69
Lampiran :
Sifat : **Pemberitahuan**

Kepada

Yth. Sdr. **BARBOYO**
Pemegang SIP Rumah Dinas No. 15..
Jln. Nuri Remu Utara
di-

SORONG

Dengan hormat,

Berdasarkan SK. Bupati Sorong No. 225 tanggal 15 September 2000 dan hasil sosialisasi tanggal 14 s/d 20 Juli 2001 tentang Penjualan Rumah Negara Gol. III, maka bersama ini diberitahukan dan ditegaskan kembali kepada saudara : besarnya Harga Jual Rumah Negara Gol. III, Jumlah Uang Muka dan Angsuran per bulan agar dapat diperhatikan untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai berikut :

A. 1. Harga Jual Rumah Negara Gol. III :		Rp. 27.738.400,-
a. Harga Jual Bangunan	Rp. 14.580.000,-	
b. Harga Jual Tanah	Rp. 13.158.400,-	
2. Jumlah Kredit (jangka waktu ...72..... Bulan)		Rp. 18.000.000,-
3. Jumlah Uang Muka		Rp. 9.738.400,-
4. Angsuran Per bulan	Rp. 250.000,-	

bahwa upaya untuk meningkatkan PAD sektor Penjualan Rumah Negara Golongna III yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, maka atas perintah Bapak Bupati jumlah uang muka tersebut diatas supaya disetorkan ke Kas Daerah pada BPD Cabang Sorong dengan Nomo. Rekening : 1.2.4.016.

Satu lembar bukti setoran disampaikan ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Sorong d/a. Jln. Merpati No. 15 Remu Utara Sorong.

- B. Pemegang SIP yang telah melunasi Uang Muka dapat menandatangani Akta Perjanjian / Kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Sorong pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Sorong.
- C. Para Pemegang SIP yang membeli / membayar secara tunai atau telah melunasi Harga Jual Rumah Negara Gol. III, maka langsung balik nama Sertifikat Tanah melalui PPAT di Sorong.
- D. Hal-hal yang belum jelas agar berhubungan dan tanya langsung kepada petugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Sorong dengan alamat jalan Merpati No. 15 Remu Utara Sorong. Telp. (0951) 323117.

Demikian pemberitahuan ini untuk dinaklumi, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.-

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SORONG

Drs. SUDIRMAN, MSI
NIP. 640013729

Terdapatnya kepada Yth :

- 1. Bupati Kabupaten Sorong sebagai laporan ;
- 2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sorong di Aimas ;
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong di Sorong ;
- 4. Arsip.

BUKU No.
Harap di Bukukan Pada Rekening
Pemegang Kas Daerah Tk.II Sorong.
Ac.1701.

SURAT TANDA SETOR

BANK PEMBANGUNAN DAERAH IRIAN JAYA CABANG SORONG

Terima dari : H A R S O Y O
Sebesar : Rp. 1.000.000.00
Terbilang : SATU JUTA RP.
Keterangan : pembayaran Uang muka rumah dinas an.harsoyo
pemegang sip rumah dinas no.15 jl.nuri no.15 srg

Angka : 1 . 2 . 4 . 016

Sorong 28 Desember 2001
Yang menyetor,



HARSOYO

Sorong, 28 Desember 2001
Jumlah tsb diatas diterima oleh
Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya
Cabang sorong.



28 DEC 2001
28 DEC 2001

BANK PEMBANGUNAN DAERAH IRIAN JAYA
CABANG SORONG

✓

03 203 TRESI 4/30/08 24/04/2008 10:42:38
203 21.10.08 0.738.400.00 PENGELUARAN RUTIN KTR BUPATI
DI 201-> Rp 0,738,400 K Di Sorong, 30 APR 2008

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG

TERIMA DARI : HARSOYO

SEBESAR : 8,738,400.00

**TERBILANG : DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH
DELAPAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH**

**URAIAN : SETORAN ANGSURAN RUMAH DINAS MILIK PEMDA KAB.
SORONG A.N.BPK.HARSOYO JL.NURI NO.15 SORONG
SISA ANGSURAN UANG MUKA**

AYAT : 1,2,4,008

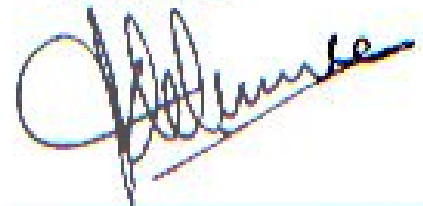
SORONG, 30 APRIL 2008

YANG MENYETOR



NY. HARSOYO

**SORONG, 30 APRIL 2008
JUMLAH TSB DIATAS DITERIMA OLEH
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
KCP AIMAS**



As: 2008

BUKU NO :
MASAP & BUKU PADA REKENING
PEMILIK KAB DAERAH KAB. SORONG
AC.21,1000,01701-7

02 203 10929 10/20/08 20/10/2008 09:12:53
203 21.10.06-01701.7 PENGELUARAN RUTIN KTR BUPATI
01 201-> Rp 3,000,000 K ALM BPK HARSOYO

SURAT TANDA SETOR

PT. BANK PAPUA CABANG PEMBANTU AMAS

TERIMA DARI : ALMARHUM BPK HARSOYO

SEBESAR : Rp. 3,000,000

TERDIRI DARI : TIGA JUTA RUPIAH

URAIAN : SETOR ANGBURAN ATAS PEMBELIAN RUMAH DINAS KAB. SORONG
AK. ALMARHUM BPK. HARSOYO JAL. NURI NO 15 SRG

AYAT : 1.24.119

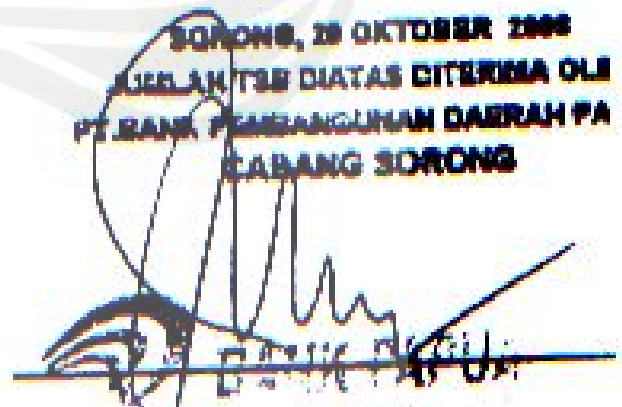
SORONG, 28 OKTOBER 2008

YANG MENYETOR


M. HARSOYO

2 - OCT 2008

SORONG, 28 OKTOBER 2008
KEDAHATIAN DIATAS DITERIMA OLEH
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PA
CABANG SORONG


PT. BANK PAPUA
CABANG SORONG

BUKU NO :
HARAP DI BUKU PADA REKENING
PEMEGANG KAS DAERAH KAB. SORONG
AC.21.1006.01701-7

SURAT TANDA SETOR

PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG

TERIMA DARI : Sdr. H A R S O Y O

SEBESAR : Rp. 15.000.000,000

TERBILANG : LIMA BELAS JUTA RUPIAH

URAIAN : PELUNASAN ATAS PEMBELIAN RMH DINAS MILIK
PENDA KAB. SORONG AN; BPK. HARSOYO
JLN. NURI REMU UTARA NO. 16
BULAN MARET 2009.

AYAT : 1.2.4.010

AIMAS, 3 MARET 2009.

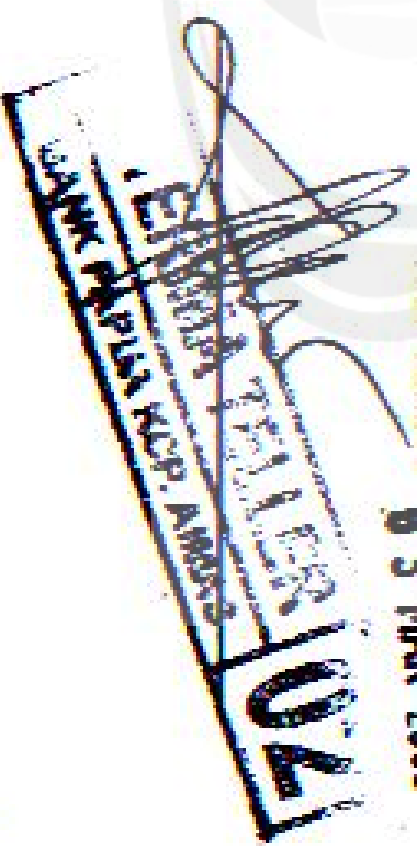
YANG MENYETOR
Sdr. HARSOYO


TURASMI

04 203 10929 3/3/09 03/03/2009 08:52:14
203 21.10.06-01701.7 PENGELUARAN RUTIN KTR BUPATI
01 201 -> Rp 15.000.000 K SDR HARSOYO

AIMAS, 3 MARET 2009.

JUNILAH TSB DATAS OTERIMA OLEH
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
KCP AIMAS 8 3 MAR 2009


PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
KCP AIMAS
04

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009 PERKOTAAN

NO. SPPT(NOP): B2.13.030.004.007-1149.0

NO. 13. M. ADA

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
JL. NURI RT. RW. KEMU UTARA SORONG KOTA KOTA SORONG			HARISBYO JL. NURI RT. RW. KEMU UTARA KOTA SORONG		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)		JUMLAH
			PER M2		
BUKI	260	A27	160.000	✓	41.600.000
BANGUNAN	32	A09	310.000		13.020.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =					54.620.000
NJOPTK (NJOP Tidak Kena Pajak)					5.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB					49.620.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)					9.324.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang					46.620
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)					46.620
EMPAT PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS DUA PULUH RUPIAH					
TGL. JATUH TEMPO 30 SEP 2009			SORONG, 05 JAN 2009 ✓		
TEMPAT PEMBAYARAN BANK PAPUA CAB SORONG ATM: BCA, BNP, BII, BUMIPUTERA, BOKOP IN- MANDIRI, BNI			KAPAL KANTOR		
SPPT DAN STTS PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN			Kepala Kantor NIP. 1304082210		

(2402090255504RAD2M6501) - 0000000

KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PBB

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BANK PAPUA CAB SORONG
Telah menerima pembayaran PBB Th. 2009 dari No. 0042
Nama Wajib Pajak: HARISBYO
Letak Objek Pajak: Kecamatan SORONG KOTA
Desa / Kel. KEMU UTARA
Nomor SPPT (NOP): B2.13.030.004.007-1149.0
Sejumlah: Rp. 46.620

Tanggal Jatuh Tempo: 30 SEPTEMBER 2009

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):

I	46.620	XIII	58.710
II	46.620	XIV	59.870
III	46.620	XV	61.030
IV	46.620	XVI	62.190
V	46.620	XVII	63.350
VI	46.620	XVIII	64.510
VII	46.620	XIX	65.670
VIII	46.620	XX	66.830
IX	46.620	XXI	67.990
X	46.620	XXII	69.150
XI	46.620	XXIII	70.310
XII	46.620	XXIV	71.470

KP. PBB 5/2 Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran: LT: 05
Jumlah yang dibayar: LB: 46.620
Rp. 46.620

Tanda Terima
Kepala Kantor
NIP. 1304082210

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN
AKTA KEMATIAN

No. 474.3/ 67

Data catan ----- **UMUM** ----- tentang

kematian menurut Stbl d 1920 No. 751 Yo. 1927 di ----- **Sorong** -----
No. 564

ternyata bahwa di ----- **SORONG** -----

pada tanggal ----- **DUA PULUH FEBRUARI** -----

----- **TAHUN DUARIBU DELAPAN** -----

telah meninggal dunia : ----- **HARSOYO** -----

Anak pertama dari suami-isteri :

----- **ASMANIRUN BUDIHARJO dan SUKINAH SUKINEM** -----

Lahir di Blitar Tanggal sepuluh Juni -----

Tahun seribu sembilan ratus empatpuluh enam -----

Pekerjaan : Pensiunan PNS -----

Suami dari : **TURASMI** -----

Alamat : Jl. Nuri No. 15 Kel. Remu Utara Sorong -----

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

S O R O N G, tanggal **DUAPULUH ENAM**

BULAN FEBRUARI TAHUN DUARIBU DELAPAN

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL KOTA SORONG



YAKOBUS SUSIM, S. Sos
Nip. 010 227 430

PEMERINTAH KOTA SORONG
DISTRIK SORONG
KELURAHAN REMU UTARA

Jamat : Jl. Mesjid Raya No. 8 HBM Sorong

Telp. : 322956

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, para Ahli wasis dari
Almarhum HARSOYO
menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah
bahwa : ALMARHUM HARSOYO
tempat tinggal terakhir di SORONG
dan pada tanggal 20 FEBRUARI 2009 telah meninggal dunia.
Dari perkawinan HARSOYO dan TURASMI
telah lahir dan kini masih hidup 2 (DUA) orang anak.

1. ANANG HARRIS HARTIANTO
2. EMMY HANTI HARYUNI
3.
4.
5.

Demikian kami ISERI dan anak tersebut adalah pewaris
dari ALMARHUM HARSOYO.

Para Ahli waris tersebut adalah :

1. TURASMI
2. ANANG HARRIS HARTIANTO
3. EMMY HANTI HARYUNI
4.
5.

Sorong, 11 MEI 2009.

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4.
5.

Nomor : ATA-3/PS

Dikuatkan oleh kami

Sorong, 11.05.2009

Nomor : 400/235/2009/04/2009

Disahkan dan dibenarkan oleh kami

Sorong,



SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah :

1. Nama : Turasmi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.Nuri No.15 Remu Utara Sorong
2. Nama : Emmy Harti Haryuni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.Tanjung Rimoni Klawuyuk Sorong Utara
3. Nama : Anang Harris Hartianto
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl.Nuri No.15 Remu Utara Sorong

Dalam hal ini kami adalah ahli waris dari almarhum Harsoyo, seperti tersebut dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Lurah No. 400/235/RMT/09/2009 tanggal 12 Mei 2009.

Bahwa dengan surat ini kami telah sepakat bahwa sertifikat atas rumah Dinas yang berlokasi di Jl.Nuri No.15 Sorong, hanya dibalik nama ke atas nama Anang Harris Hartianto.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun juga, apabila kami ingkar atas isi dari pernyataan ini maka kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Sorong, 30 November 2009

Yang Membuat Pernyataan


Turasmi
Emmy Harti Haryuni
Anang Harris Hartianto

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



serviens in veritatis

SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

SORONG ✓

46.06.01.08.4.00280

AM 530928

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : *PAKAI* No. *280*

PROPINSI : *IRIAN JAYA*

KABUPATEN / KOTAMADYA : *SORONG*

KECAMATAN : *SORONG TIMUR*

DESA / KELURAHAN : *REMU UTARA*

DAFTAR ISIAN 208
 No. *289* / 1999

DAFTAR ISIAN 307
 No. *453* / 1999

**KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTAMADYA
 SORONG**

4	5	5	0	9	2	8	4	0	0	2	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a) HAK : *P A K A I*
 No. : *280*
 Desa / Kel. : *REMU UTARA*
 Tgl. berakhirnya hak :

f) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SORONG

Tanggal lahir / akta pendirian

b) NIB *3440*
 Letak Tanah

c) ASAL HAK

1. ~~Konversi~~
2. Pemberian hak
3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN

Sorong Tgl. *11-03-1999*
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
Sorong

ttd.

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
 Tgl.
 No.
2. Surat Keputusan ^{*KKW. BPH PROP. IRJA*}
28-10-1998
 Tgl.
 No. *BPN. 66/HP/1998*
3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang
 Tgl.
 No.

Ir. ABDUL RACHMAN NASUTION
 NIP *010 153 679.*

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Sorong Tgl. *12-04-1999*
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
Sorong

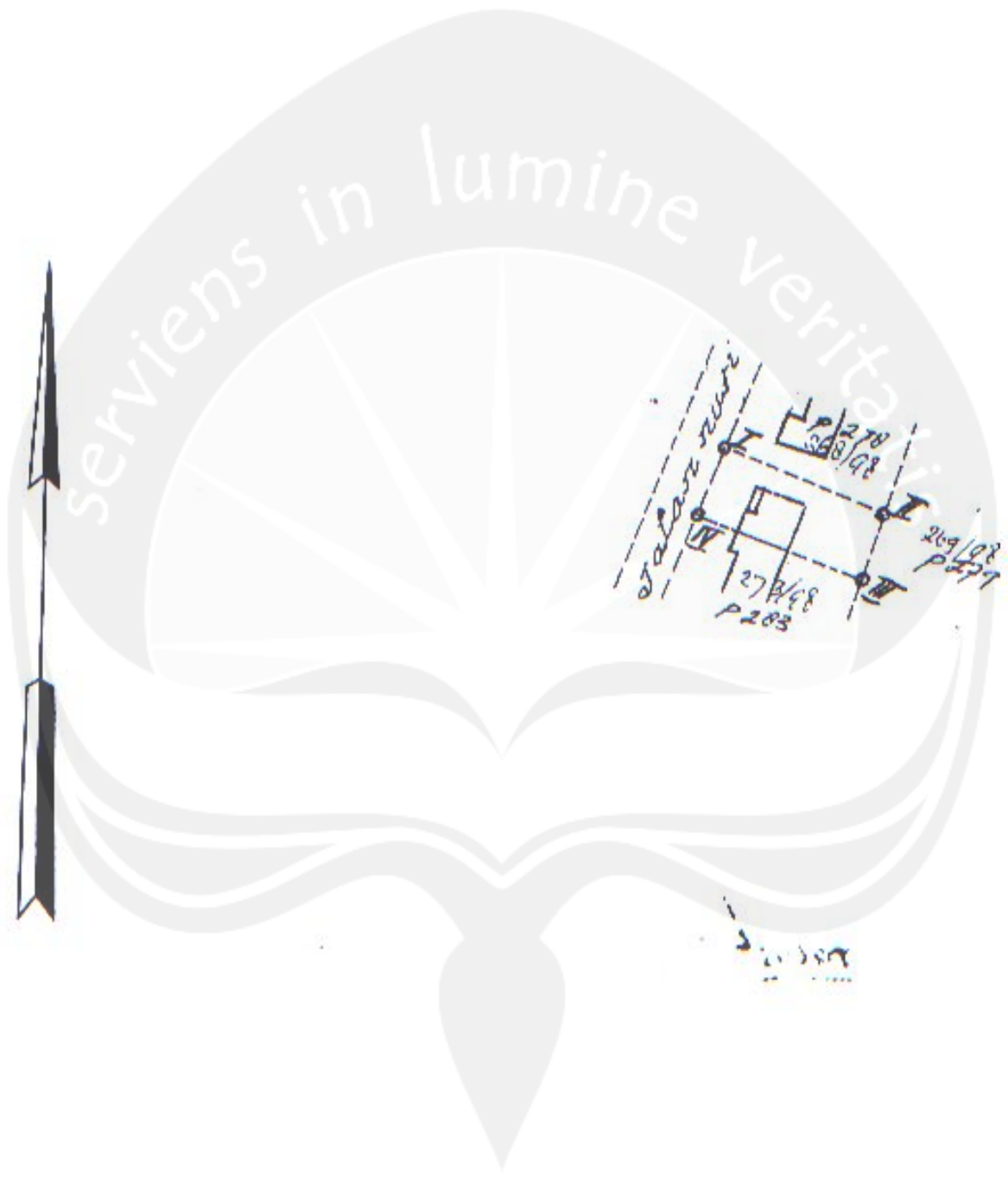
e) SURAT UKUR
29-01-1998
 Tgl.
 No. *270/1998*
 Luas. *257 M2*



Abdul Rachman Nasution
 NIP *010 153 679.*

i) PENUNJUK WARKAH NOMOR : *289/208/1999*

SKALA 1 : 1:000



PENJELASAN : **batas tanah ini**

6.060.008.4.00280 ✓

SURAT UKUR

Nomor : 270... / 19.. 98. ✓

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : IRIAN JAYA ✓
 Kabupaten / Kotamadya : SORONG ✓
 Kecamatan : SORONG TIMUR ✓
 Desa / Kelurahan : REMU UTARA ✓
 Kota : REMU UTARA ✓ Nomor Peta Pendaftaran :
 Lembar : 8 Kotak : B.C. 6 ✓

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya telah berdiri
 sebuah bangunan rumah tinggal.

Panda-tanda batas : Pipa Besi I sampai dengan semuanya berdiri disudut-
 sudut batas bidang tanah ini .-

Luas : 257 M² (Dua ~~atus~~ ^{ratus} lima puluh tujuh meter persegi) ✓

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II
 Sorong dan ditetapkan oleh Panitia Pemeriksaan
 Tanah A Kabupaten Sorong.

Hal lain - lain :
.....
.....

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

Sorong Tgl. *29 - 01 - 19⁹⁸*

Sorong Tgl. *12 - 04 - 19⁹⁹*

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Sorong

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Sorong



ttd.

Ir. ABDUL RACHMAN NASUTION

AGUSTINUS SAGIMAN, S.Sos.-

NIP *010 153 679*

NIP *010 074 963*

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 19..... Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak



**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KOTA SORONG**

Sebesar - besarnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berakhirnya masa, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

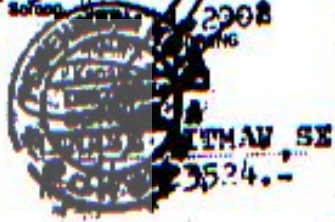
5127

[Signature]



Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang K.T.P

Nomor K.T.P. : 474.4/2000/RMU-ORU/
 Nama lengkap : ANANG HARRIS HARTIANTO
 Jenis kelamin : LAKI-LAKI Golongan darah : A
 Tempat/tgl.lahir : SORONG, 22-02-1978 Agama : ISLAM
 Kawin/ tidak kawin : B.KAWIN
 Pekerjaan : TIDAK ADA
 Alamat : JL. NURI No. 15
 RT / RW : 01/VI Sorong, 22-02-2008
 Kelurahan : RENU UTARA
 Distrik : SORONG
 Berlaku hingga : 22-02-2013



**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KOTA SORONG**

Sebesar - besarnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berakhirnya masa, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

0155504

[Signature]



Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang K.T.P

Nomor K.T.P. : 4744/445/RMU-ORU/
 Nama lengkap : TURASMI
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Golongan darah : B
 Tempat/tgl.lahir : MEDAN, 15-07-1958 Agama : ISLAM
 Kawin/ tidak kawin : KAWIN
 Pekerjaan : TIDAK ADA
 Alamat : JL. NURI No. 95
 RT / RW : 01/VI Sorong, 08-02-2008
 Kelurahan : RENU UTARA
 Distrik : SORONG
 Berlaku hingga : 08-02-2008



**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KOTA SORONG**

Sebesar - besarnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berakhirnya masa, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

1133732

[Signature]



Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang K.T.P

Nomor K.T.P. : 474.4/4.156/KEM-SU/2007
 Nama lengkap : EMMY HARTI HARYUNI
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Golongan darah : "A"
 Tempat/tgl.lahir : SORONG, 08 DESEMBER 1980 Agama : ISLAM
 Kawin/ tidak kawin : KAWIN
 Pekerjaan : T.ADA
 Alamat : JL. TANJUNG RIMONI
 RT / RW : 04/II Sorong, 21 MEI 2007
 Kelurahan : KLAWUYUK
 Distrik : SORONG UTARA
 Berlaku hingga : 08 - 12 - 2012

